



PEMIKIRAN DAN AKSI POLITIK AHMAD SYAFII MAARIF

1.)Sultani B. Silalahi, 2.) Sri Rahwani Marbun, 3.)Nurhidayah

Pendidikan Agama Islam, Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Sibolga Tapanuli Tengah

Abstrak

Syafii Maarif adalah seorang pemikir Muslim Indonesia yang memiliki pemikiran tentang hubungan antara ajaran Islam dan politik. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Muhammadiyah dan pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung Indonesia. Menurutnya, Islam memiliki hubungan dengan politik dan negara, karena ajaran Islam akan memberi warna pada politik. Politik tidak hanya sebatas kekuasaan, tetapi politik itu mulia, yaitu memberikan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu politik adalah ijihad siyasi oleh para pemikir muslim. Dasar, bentuk, tujuan dan kepala negara ditentukan oleh rakyat sebagai pembentuk negara. Bangsa Indonesia telah memutuskan untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila yang melindungi.

Kata Kunci: Energi Listrik, Kebijakan, Ketahanan Energi, dan Pertahanan Negara,

Abstract

Syafii Maarif is an Indonesian Muslim thinker who has thoughts on the relationship between Islamic teaching and politics. He once served as Chairman of Muhammadiyah and served as a member of the Supreme Advisory Council of Indonesia. According to him, Islam has a relationship with politics and the state, because Islamic teachings will give color to the politics. Politics is not only limited to power, but politics is noble, namely providing services to the community. Therefore politics is ijihad siyasi by Muslim thinkers. The basis, form, purpose and head of state are determined by the people as forming the state. The Indonesian people have decided to form the Republic of Indonesia based on Pancasila which protects the pluralistic Indonesia people. This is in accordance with Islamic teaching in the view of Syafii Maarif.

Keywords: Thought, Action, and Politics

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu Negara modern yang memiliki heterogenitas tinggi, tentu

memiliki teori tersendiri yang dihasilkan oleh anak bangsa dan zamannya. Salah satu pemikir muslim Indonesia yang memikirkan

*Correspondence Address : Silalahisultani1@gmail.com

DOI : 10.31604/jips.v7i3.2020.685-688

© 2020 UM-Tapsel Press

tentang teori politik yang sesuai dengan negara Indonesia adalah Syafii Maarif. Syafii Maarif adalah seorang santri dari keluarga dan masyarakat yang religius serta lama menuntut ilmu-ilmu agama Islam di pondok pesantren yang dikelola Muhammadiyah yang beraliran modern dan juga pernah menuntut ilmu dibawah asuhan Fazrul Rahman di Amerika Serikat yang tentu ini memiliki pengalaman dan pemikiran tersendiri di bidang politik Islam.

Di antara pemikiran Syafii Maarif yang sangat controversial adalah muslim di Indonesia tidak perlu untuk menjadikan Indonesia menjadi negara Islam. Usaha untuk menjadikan Indonesia menjadi negara Islam. Usaha untuk menjadikan Indonesia menjadi negara Islam adalah perbuatan sia-sia dan menguras energy. Ia dengan sangat berani telah menyangkal pendapat sekelompok orang yang masih ingin berjuang untuk menjadikan Indonesia menjadi Daulah Islamiyah.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah Metode Kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Islam dan politik dalam pemikiran Syafii Maarif merupakan ijtihad yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Politik merupakan ibadah yang tidak berbeda dengan ibadah-ibadah lainnya, karena di dalam politik terdapat seni untuk mengurus kepentingan banyak orang. Politik dalam Islam bukan hanya berkaitan dengan perebutan kekuasaan, akan tetapi bagaimana agar kepentingan orang banyak bisa dipenuhi. Banyak ayat yang menjelaskan tentang politik dari pada ayat yang mengatur puasa. Oleh karena itu, berpidato di gedung parlemen juga merupakan ibadah yang memili pahala.

Pemikiran politik Syafii Maarif berkaitan dengan negara adalah negara bukan lah din akan tetapi ia

merupakan ijtihad politik. Karena negara adalah ijtihad politik maka dasar negara diserahkan kepada warga negara yang membentuk negara tersebut, bisa berdasarkan agama Islam dan juga bisa berdasarkan kesepakatan yang membentuk negara tersebut. Menurut Syafii Maarif, bentuk negara yang ideal saat ini adalah republik demokrasi karena ia dibangun atas dasar musyawarah dan ini sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Kepala negara adalah orang yang dipilih warga negara dengan syarat ia adalah amanah, adil berkualitas dan berwawasan luas. Oleh karena itu, tidak mesti suku Quraish, tidak mesti harus laki-laki dan juga tidak mesti harus menganut agama Islam. Suku apa saja, jenis kelamin apa saja dan penganut apa saja ia boleh menjadi kepala negara. Syarat utama kepala negara menurut Syafii Maarif adalah amanah dan adil sesuai dengan ketentuan ayat Al-Quran.

Aksi politik yang ditempuh oleh Syafii Maarif adalah melalui jalur masui ke dalam pemerintahan dan juga dari luar pemerintahan. Syafii Maarif pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang bertugas memberikan masukan dan nasehat bagi presiden sebagai kepala negara. Ia juga melakukan aksi politik melalui penekanan kepada pemerintah untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar melalui organisasi Muhammadiyah dan Maarif Intitut yang dibentuknya bersama teman-teman. Aksi politik yang dilakukannya juga melalui lobi-lobi, diantaranya lobi untuk perdamaian Aceh, perdamaian antar umat beragama dan lobi dengan organisasi sosial kemasyarakatan lainnya, seperti Nahdatul Ulama dan lain sebagainya. Ia juga melakukan diplomasi komunikasi dengan presiden Amerika Serikat, Gorge W Bush dan Perdana Menteri Singapura serta dengan Pemerintahan Thailand. Ia tidak melakukan akasi politik melalui partai, karena meneurutnya ia sudah tua sehingga tidak sanggup lagi dan juga karena didalam partai politik itu terdapat banyak kepentingan.

SIMPULAN

Politik dalam Islam bukan hanya berkaitan dengan perebutan kekuasaan, akan tetapi bagaimana agar kepentingan orang banyak bisa dipenuhi. Menurut Syafii Maarif, bentuk negara yang ideal saat ini adalah republik demokrasi karena ia dibangun atas dasar musyawarah dan ini sesuai dengan prinsip ajaran Islam. Aksi politik yang ditempuh oleh Syafii Maarif adalah melalui jalur masui ke dalam pemerintahan dan juga dari luar pemerintahan. Syafii Maarif pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) yang bertugas memberikan masukan dan nasehat bagi presiden sebagai kepala negara..

SIMPULAN

Dari uraian di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat tiga konsep dalam ketahanan energi yaitu: (1) adanya ketersediaan sumber daya energi yang mencukupi permintaan energi, (2) tercukupinya kebutuhan konsumsi energi dengan adanya dukungan berbagai sarana dan pihak pendukung lain seperti pendistribusian, transportasi, bagian produksi dan lain-lain, dan (3) berkaitan dengan minimnya dampak negatif dari produksi dan konsumsi energi terhadap lingkungan sekitar dan juga kesehatan manusia dan makhluk lainnya. Oleh karena itu, dalam kebijakan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri yang berkaitan dengan ketahanan energi khususnya dalam sektor transportasi merupakan wujud dalam penerapan prinsip ketahanan energi. Manfaat dari ketahanan energi berbasis energi listrik yaitu menguntungkan dalam berbagai segi seperti lingkungan, kualitas udara, perawatan

kendaraan, kebutuhan energi, kesehatan manusia, dan ketahanan nasional. Wujud ketahanan energi ini memberikan dampak positif dalam ketahanan nasional dan tentunya dapat mendukung pertahanan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Burhani, Ahmad Najib, et.all(Ed),Muazzin Bangsa dari Makkah Darat, Jakarta: Maarif Institute dan Srambi, 2015.
- Frederick, Wiliam H., Batu Loncatan; Syafii Maarif di Athens, Ohio AS dalam Epilog buku Ahmad Najib Burnahi, et. al (Ed), Muazin Bangsa dar Makkah Darat, Jakarta: Srambi,2015
- Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan Studi Tentang Peraturan dalam Konstituante, Jakarta Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 2002.
- Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1950-1965, Yogyakarta, IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.
- Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Ke Indonesiaan dan Kemanusiaan Sebuah Refleksi Sejarah, Jakarta: Mizan, 2009.
- Ahmad Syafii Maarif, Mencari Autensitas dalam Kegalauan, Jakarta, Pusat Studi Agama dan Peradaban Muhammadiyah, 2004.
- Ahmad Syafii Maarif, Masa Depan Bangsa dalam Taruhan, Yogyakarta, Pustaka SM, 2000.
- Ahmad Syafii Maarif, Menggugah Nurani Bangsa, Jakarta, Maarif Intitute, 2005.
- Ahmad Syafii Maarif, Tuhan Menyapa Kita, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.

- Ahmad Syafii Maarif, Titik-titik Kisar di Perjalananku; Autobiografi Ahmad Syafii Maarif, Jakarta: Mizan dan Maarif Intitut, 2009
- Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Masalah Kenegaraan Studi tentang Peraturan dan Konstituante, Jakarta LP3Estut, 2009.
- Ahmad Syafii Maarif, Al-Quran dan Realitas Umat, Jakarta: Republika, 2010.
- Ahmad Syafii Maarif, Al-Quran, Realitas Sosial dan Limbo Sejarah; Sebuah Refleksi, Bandung; Penerbit Pustaka, 1985
- Ahmad Syafii Maarif, Islam dan Politik di Indonesia, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Press, 1988.
- Ahmad Syafii Maarif, Meluruskan Makna Jihad Cerdas Beragama Ikhlas Beramal, Jakarta: Centre for Moferate Moslem, 2005
- Ahmad Syafii Maarif, Tuhan Menyapa Kita, Yogyakarta: IRCiSoD, 2020.
- Ahmad Syafii Maarif, Menerobos Kemelut; Catatan-catatan Kritis Sang Guru Bangsa, Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyyat, Beirut: Dar al Fikr, t.t
- Al-Maududi, Abul A'ala, Hukum dan Konstitusi; Sistem Politik Islam, Bandung: Mizan, 1998.
- Mernissi, Fatima, Wanita di Dalam Islam ter. Yaziar Radiani, Bandung: Pustaka, 1994.
- Mernisi, Fatima, Pemberontakan Wanita, Peran Intelektual Kaum Wanita dalam Sejarah Muslim, Bandung: Mizan 1999.
- Pulungan, J Suyuthi, Prinsip-prinsip Pemerintahan dalam Piagam Madinah Ditinjau dari Pandangan Al-Quran, Jakarta: Lembaga Study Islam dan Kemasyarakatan Jakarta, 1994.